



Judul : KASN Minta Seleksi Sekretaris Jenderal DPR Terbuka
Tanggal : Sabtu, 09 September 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

KASN Minta Seleksi Sekretaris Jenderal DPR Terbuka

DPR disebut akan menggunakan cara lama, yakni mutasi pejabat.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kalangan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menyelesaikan posisi Sekretaris Jenderal DPR secara terbuka dan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Tidak boleh menggunakan cara lain, karena itu melanggar aturan hukum," ujar Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dimly ketika dihubungi kemarin.

Aturan yang dimaksudkan oleh Irham tertuang dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Isinya adalah pemilihan jabatan pimpinan tinggi utama, termasuk posisi Sekretaris Jenderal DPR, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Selanjutnya, hasil seleksi terbuka itu akan diserahkan ke Presiden untuk dipilih.

Irham menuturkan, lembaganya tidak ingin DPR mengulangi pelanggaran yang dilakukan dalam pergantian Sekretaris Jenderal DPR pada Maret lalu. Ketika itu hasil panitia seleksi

yang dibentuk Ketua DPR Ade Komarudin dibatalkan oleh Setya Novanto. Pembatalan itu terjadi setelah Ade lengser dari jabatan Ketua DPR dan digantikan oleh Setya. Setya melantik Achmad Djuned sebagai Sekretaris Jenderal DPR menggantikan Winantuningtyas dengan cara mutasi.

KASN sudah meminta DPR segera membentuk tim seleksi terbuka. "Kami hanya merekomendasikan seleksi terbuka, agar reformasi birokrasi bisa berjalan," ujar Irham.

Achmad Djuned akan memasuki masa pensiun pada 1 Oktober mendatang. Namun DPR tidak kunjung membentuk panitia seleksi secara terbuka. Padahal sejak 4 April lalu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah mengirim surat permintaan agar segera membentuk tim seleksi terbuka.

Senin lalu, pimpinan DPR baru menggelar rapat untuk merespons hal tersebut. Namun rapat itu juga belum membuahkan hasil karena tidak semua anggota pimpinan DPR hadir. Rencananya, pimpinan DPR akan kembali menggelar rapat ihwal seleksi terbuka posisi Sekjen

DPR ini pada Senin pekan depan. Sumber *Tempo* di DPR menuturkan, pimpinan Dewan sengaja mengulur waktu pembentukan seleksi terbuka karena sudah menyiapkan satu nama.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai lambatnya proses pergantian sekretaris jenderal ini penuh muatan kepentingan. Banyak yang mengincar posisi tersebut. "Sebab, dia pemegang kuasa anggaran," ujarnya. "Saya curiga pimpinan DPR mempersiapkan calon tertentu."

Direktur Komite Pemandu Legislatif (Kopel), Syamsuddin Alimsyah, meminta supaya posisi Sekretaris Jenderal DPR diisi orang independen agar bisa meningkatkan kinerja Dewan. Karena itu, "Tim seleksi harus segera dibuka dan dijalankan secara transparan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah anggapan bahwa pimpinan DPR telah mempersiapkan calon tertentu untuk posisi sekretaris jenderal. Ihwal pembentukan panitia seleksi, ucap dia, itu akan segera dibentuk pada pekan depan dengan masa tugas dua bulan. "Nanti posisi sekretaris jenderal akan diisi oleh pelaksana tugas," ujarnya. ●